PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Sudirman Sago – Painan

e-Mail:tourism_pessel.co.id Website:www.pesisirselatan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 556/34 /SK/DPPO-2021

TENTANG

REVISI PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DILINGKUNGAN DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu, serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. bahwa penunjukan dan penetapan PPTK dan PPK dimaksud pada huruf **a** dan **b** di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten, jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undeang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58. Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

12. Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008

Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, tanggal 08 Januari 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

19. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 133 Tahun 2021, tanggal 30 September 2021, tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/676/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 12 November 2021 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk ASN yang tersebut namanya pada lajur 2, dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dan 5, pada Program, Kegiatan dab Subkegiatan sebagaimana tersebut pada lajur 6, lampiran Surat Keputusan ini dilingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga TA. 2021.

Kedua : Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut:

Menyiapkan organisasi dan kegiatan;

2. Mengendalikan dan memonitor pelaksana kegiatan;

3. Megusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):

Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Kepala Bidang/ Sekretaris yang menjadi atasan langsung;

Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen anggaran atas beban

pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut:

- Meneliti Kelengkapan SPP LS Pengadaan Barang / Jasa yang Disampaikan Bendahara Pengeluaran yang Diketahui / Setujui Oleh PPTK;
- Meneliti Kelengkapan SPP UP, GU, TU Dan LS Barang Jasa, LS Gaji dan Tunjangan PNS Serta Penghasilan Lainnya yang Ditetapkan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku;
- 3. Melakukan Verifikasi SPP;
- 4. Menyiapkan SPM;
- 5. Melakukan Verifikasi Atas Penerimaan;
- 6. Melaksanakan Akuntansi SKPD;
- Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD.

Dalam Pelaksanaan Pekerjaan PPK akan dibantu oleh Staf PPK.

Ketiga

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada anggaran SKPD Dinas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, mata anggaran kegiatan yang bersangkutan.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 November 2021.

Ditetapkan di : Sago

Pada Tanggal : 15 November 2021

KEPALA DINAS,

forming

SUHENDRI, S.Pd., M.Si NIP. 19670723 199512 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan

2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

3. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

4. Arsip

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 556/ **34** /SK/DPPO-2021 TANGGAL: 15 November 2021

NO 1	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM SKPD	JABATAN DALAM KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN YANG DIKELOLA	
					6	
1	ROSTIKA MAWARTI, SH NIP. 19640803 198710 2 001	Penata Muda Tk.I (III.d)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPTK	PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2.1 Penyediaan Gagi dan Tunjangan ASN. 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. 3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah. 4.1 Penyediaan Komponen Instansi Listrtik/penerangan Bangunan. 4.2 Penyediaan Komponen Instansi Listrtik/penerangan Bangunan. 4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Peraturan Perundang-Undangan. 4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. 4.6 Fasilitas Kunjungan Tamu. 4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 5.1 Pengadaan Mebel. 6 Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 6.1 Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 6.2 Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor. 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah. 7.1 Penyediaan Jasa Peneliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 7.2 Pemeliharaan Mebel. 7.3 Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya. 7.4 Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya. 7.4 Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.
	s. PURWANDRI P. 19650613 199703 1 001	Pembina (IV.a)	Kasi Pengembangan Pemuda	РРТК	PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota. 1.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasi Daya Saing Pemuda Pelopor. 1.2 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera.

1	2	3	4	5		6
	USMITRI DONAL, SS NIP. 19790325 200801 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Olahraga	PPTK	PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan Kegiatan Sub Kegiatan	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN. Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 2.1 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 1.1 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
	SUHENDRA JUFRIDAL, SH NIP. 19680712 199003 1 005	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	PPTK	PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. 1.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.
5	NOVRIANTO PUTRA, SST. Par, MM NIP. 19770323 201212 1 004	Penata Muda TK.I (III/b)	Kasi Perencanaan Teknis Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga.	PPTK	PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota 1.1 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota.
6	SUKMA RONI, SST NIP. 19690612 199003 1 006	Pembina TK. I (IV.b)	Kasi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PPTK	PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. 1.1 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
7	FEBRIADI, SS NIP. 19820210 201001 1 034	Penata (III/c)	Kasi Destinasi dan Industri	PPTK	PROGRAM Kegiatan SubKegiatan	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. 1.1 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. 1.2 Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata Kab/Kol 1.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolahan Destinasi Pariwisa
8	ISFILDI. S.A.P NIP. 19671018 198903 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Sumber Daya Manusia Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	РРТК	PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	PEGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOM KREATIF 1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. 1.1 Pegembangan Kopetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2.2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitr. 2.3 Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konserv. 2.4 Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM Ekonomi Kreatif
9	KHAIDAR RAMLI, S.Pd., M.Si NIP. 19710515 199802 1 001	Pembina (IV.a)	Kasi Promosi dan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	РРТК	PROGRAM Kegiatan Sub Kegiatan	PEMASARAN PARIWISATA 1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi d Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota. 1.1 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.

1	2	3	4	5		6
10	ASNAF. A, SH NIP.19800910 200604 2 009	Penata TK.I (III/d)	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	PPK	PROGRAM Kegiatan	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA. 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
11	ZULMADENTI, S.Ag NIP. 19780310 200801 2 028	Penata TK.I (III/d)	Penata Laporan Keuangan	Staf PPK		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah. 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
						6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
					PROGRAM Kegiatan	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
					PROGRAM Kegiatan	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
					PROGRAM Kegiatan	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
					PROGRAM Kegiatan	PEMASARAN PARIWISATA 1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
					PROGRAM Kegiatan	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

Sago, 15 November 2021 KEPALA DINAS,

SUHENDRI, S.Pd. M.Si NIP. 19670723 199512 1 001